

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengumpulan Data Kinerja

Dalam kerangka pengukuran akuntabilitas kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara penghitungan/pengukuran kinerja. Pengumpulan data capaian kinerja diarahkan untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu, dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan mewajibkan penyampaian laporan data kinerja secara regular: bulanan, triwulan dan seterusnya dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ke Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan selaku penanggung jawab penyusunan laporan kinerja Inspektorat.

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat dilakukan dengan menggunakan indikator sasaran kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu: (1) data internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada Inspektorat (laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan), dan (2) data eksternal yang berasal dari luar Inspektorat, baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data capaian kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur pada akhir periode selesainya seluruh program/kegiatan dalam rangka mengukur keberhasilan dari Inspektorat. Pengukuran kinerja mencakup:

- a. Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan tingkat keberhasilan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan persentase pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

% Capaian = (Realisasi / Rencana/Target) x 100 %

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

% Capaian = (Rencana - (Realisasi - Rencana) / Rencana) x 100%

Untuk memahami pencapaian kinerja ditetapkan dengan status capaian sebagai berikut:

- a. > 100% adalah Baik Sekali (BS);
- b. 80% s.d 100% adalah Baik (B);
- c. 60% s.d 80% adalah Cukup (C);
- d. < 60% adalah Kurang (K).

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Tahun 2016 merupakan tahun ketiga dalam periode Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat 2013-2018.

Adapun pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2016, perbandingan dengan tahun sebelumnya, serta perbandingan dengan target Renstra adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tahun 2016

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Tahun 2016

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional	3,000 poin	NA	NA

	Meningkatnya kualitas administrasi umum pemerintahan	Persentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi	10%	NA	NA	NA
3	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD	60%	74,85%	124%	BS
		Persentase penyelesaian TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap OPD Provinsi	90%	77,30%	85,9%	B
		Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat	WTP	WTP	100%	B
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persentase OPD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas	80%	80%	98,8%	B
		Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat	A	A	100%	B
5	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah	Persentase OPD yang melaksanakan SPIP	75%	48%	64%	C
6	Meningkatnya nilai pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat	Persentase kualitas nilai indikator RAD-PPK	100 % (Hijau)	100% (Hijau)	100%	B
		Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat	75%	22,7% atau 75%	30,2%  100%	K  B
7	Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk pengawasan internal	Jumlah Auditor dan P2UPD bersertifikasi	73 orang	61 orang	83,6%	B
		Jumlah auditor yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan Auditor Madya	20 orang	24 orang	120%	BS
		Level kapabilitas Inspektorat	III	III	100%	B



Beberapa realisasi belum bisa dicantumkan dikarenakan beberapa hal, misal: a) hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat, belum bisa diketahui (NA) dikarenakan hasil penilaian dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri sekitar bulan April; dan b) persentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi, belum bisa dikeluarkan hasilnya dikarenakan adanya keterlambatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Tim Pemeriksa.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2015	Tahun 2016	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional	2,920 poin	NA	-
2	Meningkatnya kualitas administrasi umum pemerintahan	Persentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi	22,30%	NA	-
3	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD	76,34%	74,85%	Terjadi penurunan realisasi dari tahun sebelumnya (tetapi realisasi 2016 masih di atas target tahunan) , hal ini dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi berikut tugas fungsinya sehingga mengganggu kerja internal.
		Persentase penyelesaian TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap OPD Provinsi	87,64%	77,30%	idem
		Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat	WTP	WTP	Meskipun pada LKPD tahun 2015 merupakan pertama kali menggunakan SAP <i>Acrual Based</i> , yang lebih kompleks drpd SAP <i>Cash Flow Based</i> , dengan kegiatan reviu LKPD dan asistensi <i>stock opname</i> barang yang lebih intensif, opini WTP berhasil dipertahankan

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persentase OPD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas	67%	80%	Peningkatan realisasi dikarenakan komitmen dan kesadaran Perangkat Daerah semakin meningkat, hal tersebut tidak lepas dari kinerja Inspektorat, Biro Organisasi, & Bappeda dalam upaya meningkatkan nilai SAKIP Pemprov Jabar
		Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat	A	A	idem
5	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah	Persentase OPD yang melaksanakan SPIP	47%	47%	Stagnasi realisasi dikarenakan implementasi pembinaan SPIP oleh Inspektorat tidak berjalan dengan baik
6	Meningkatnya nilai pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat	Persentase kualitas nilai indikator RAD-PPK	100 % (Hijau)	100% (Hijau)	-
		Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat	75%	22,7% Atau 100%	-
7	Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk pengawasan internal	Jumlah Auditor dan P2UPD bersertifikasi	68 orang	61 orang	Terjadi penurunan dikarenakan bbrp Pejabat Fungsional pensiun dan meninggal dunia
		Jumlah auditor yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan Auditor Madya	20 orang	24 orang	Selama tahun 2016 ada peningkatan Pejabat Fungsional yg mengikuti diklat perjenjangan Auditor Madya
		Level kapabilitas Inspektorat	II	III	Desember 2016, Inspektorat Provinsi Jawa Barat berhasil meningkatkan level dari level 2 dengan catatan & menjadi APIP Provinsi pertama yg kapabilitasnya sdh level 3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Renstra

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Renstra

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra	Tahun 2016	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional	3,250 poin	NA	Penilaian terakhir hasil EPPD adalah 2,920 meraih peringkat 3 di bawah Pemprov Jatim & Jateng. Pada tahun terakhir Renstra, Inspektorat optimis target poin bisa dicapai
2	Meningkatnya kualitas administrasi umum pemerintahan	Persentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi	10% (di bawah 190 temuan)	NA	Persentase target selalu terpenuhi, meskipun dari tahun ke tahun sangat fluktuatif. Inspektorat optimis mencapai target terakhir, risiko pencapaian target adalah sedang
3	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD	70%	74,85%	Inspektorat optimis bisa mencapai target terakhir, poin yang perlu ditingkatkan tidak lebih dari 2%. Risiko pencapaian target akhir adalah rendah
		Persentase penyelesaian TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap OPD Provinsi	100%	77,30%	Risiko pencapaian target akhir adalah sedang. Meskipun Inspektorat selalu bisa mencapai target tahunan, akan tetapi angka 100% adalah angka sempurna (idealis).
		Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat	WTP	WTP	Inspektorat optimis bisa mencapai target terakhir, fokus selama ini adalah mempertahankan hasil yang sudah dicapai, dengan tetap menjaga pelaksanaan reviu LKPD, asistensi stock opname barang, dll. Risiko pencapaian adalah sedang



	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persentase OPD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas	90%	80%	Kecenderungan peningkatan jumlah PD yg nilai SAKIP nya adalah sama dengan B ke atas sangat signifikan. Inspektorat masih yakin bisa mencapai target terakhir, meskipun harus bekerja keras. Risiko pencapaian target akhir adalah sedang
		Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat	AA	A	Risiko pencapaian target masih tinggi karena kriteria nilai AA adalah nilai sempurna yg harus didukung bukti nyata
5	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah	Persentase OPD yang melaksanakan SPIP	100%	48%	Inspektorat pesimis bisa mencapai target akhir, dikarenakan kegiatan pembinaan sangat minim dilakukan. Risiko pencapaian target akhir adalah tinggi
6	Meningkatnya nilai pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat	Persentase kualitas nilai indikator RAD-PPK	100 % (Hijau)	100% (Hijau)	-
		Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat	75%	22,7%	Asal disertai pendanaan yang optimal dan perencanaan pengawasan yang baik, Inspektorat yakin bisa mencapai target akhir. Risiko pencapaian target adalah sedang
7	Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk pengawasan internal	Jumlah Auditor dan P2UPD bersertifikasi	93 orang	68 orang	Meskipun selama beberapa tahun terakhir terjadi penurunan jumlah aparat Fungsional Pengawasan, tetapi Inspektorat masih optimis bisa mencapai target tersebut, sejak tahun 2015 Inspektorat sdh mengirim beberapa staf untuk mengikuti diklat dan mengajukan permohonan rekrutmen tenaga

				auditor dari BPKP, saat ini sedang menunggu penempatan. Risiko pencapaian target: sedang
	Jumlah auditor yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan Auditor Madya	30 orang	24 orang	Optimis tercapai, risiko pencapaian target: rendah
	Level kapabilitas Inspektorat	III	III	Target akhir sudah dipenuhi, selanjutnya tinggal menjaga status level tersebut tidak menurun

#### 4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2016

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala/hambatan tersebut.

Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016.

##### a. Sasaran Pertama: *Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah.*

- Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional

Target: 3,000, realisasi: NA, capaian kinerja: NA

Keberhasilan ataupun kegagalan dari sasaran ini belum bisa dianalisa secara nyata berdasar target indikator sasaran, dikarenakan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan hasil penilaian evaluasi LPPD secara resmi sekitar bulan April. Meskipun demikian, melihat kecenderungan dari nilai EPPD yang terus meningkat dengan signifikan sejak tahun 2013, dengan skor 2,693, selanjutnya pada EPPD tahun 2014 dicapai skor 2,750, ini menunjukkan adanya kenaikan skor sebesar 0,057, dan pada EPPD tahun 2015 mendapat skor 2,920 atau terjadi kenaikan sebesar 0,170, selain itu memperhatikan capaian kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperlihatkan adanya kenaikan yang cukup baik, sehingga diharapkan pada tahun 2016 yang ditargetkan skor 3,000 dapat dicapai sesuai rencana yang ditetapkan. Kendala yang timbul atau hambatan yang terjadi dalam merealisasikan target tersebut masih dirasakan dimana kontribusi kabupaten dan kota, dari hasil evaluasi terhadap kabupaten dan kota capaian kinerjanya relatif belum optimal.



Sasaran Kedua: Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum pemerintahan

- Persentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi

Target: 10%, realisasi: NA, capaian kinerja: NA (NA)

Keberhasilan ataupun kegagalan dari sasaran ini belum bisa dianalisa, dikarenakan adanya keterlambatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh beberapa Tim Pemeriksa, selain itu ketidakkonsistensian melaksanakan PKPT mengakibatkan tidak tercapainya/melesetnya tujuan dan sasaran pelaksanaan pemeriksaan. Untuk mengantisipasi hal ini, maka dilaksanakan Rakorwasda yang melibatkan seluruh unsur terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan pengawasan/audit ini, sehingga diharapkan PKPT merupakan suatu konsensus dari seluruh pihak serta tumbuh komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pihak pengawas maupun yang diawasi, untuk melaksanakan PKPT yang telah ditetapkan secara konsekuen.

c. Sasaran Ketiga: Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD

Target: 60%, realisasi: 74,85%, capaian kinerja: 124% (Baik Sekali)

Tabel 3.4.  
REKAPITULASI HASIL TLHP BPK RI

No	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Temuan	Rekomendasi	Status TLHP		
				TS	TB	BT
1	LKPD 2014 Pemeriksaan 2015	23	52	32	18	2
2	LKPD 2013 Pemeriksaan 2014	23	43	29	12	2
3	LKPD 2012 Pemeriksaan 2013	22	59	30	16	13
4	LKPD 2011 Pemeriksaan 2012	20	46	35	11	0
5	LKPD 2010 Pemeriksaan 2011	22	45	36	9	0
6	LKPD 2009 Pemeriksaan 2010	44	88	78	10	0
7	LKPD 2008 Pemeriksaan 2009	42	58	34	24	0
8	LKPD 2007 Pemeriksaan 2008	22	30	28	2	0
9	LKPD 2006 Pemeriksaan 2007	32	43	38	5	0
10	LKPD 2005 Pemeriksaan 2006	17	24	21	3	0
11	LKPD 2004 Pemeriksaan 2005	24	29	26	3	0
	Jumlah	291	517	387	113	17
Total Presentase				74,85%	21,85%	3,28%
TS = TLHP Telah Selesai Dengan Rekomendasi/Saran BPK						
TB = LHP Belum selesai dengan Rekomendasi/Saran BPK						
BT = Rekomendasi/Saran BPK belum ditindaklanjuti						

Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2016 dikarenakan:

- a) Inspektorat sangat komitmen dan intensif memfasilitasi Perangkat Daerah dalam rangka menyelesaikan/menindaklanjuti hasil temuan BPK-RI;
- b) Koordinasi yang berkelanjutan antara Inspektorat dan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat dan BPK-RI Pusat.

## 2) Persentase penyelesaian TLHP OPD hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap OPD

Target: 90%, realisasi: 77,3%, capaian kinerja: 85,9% (Baik)

Meskipun capaian kinerja termasuk kategori “Baik”, tetapi Inspektorat pada tahun 2016 gagal mencapai target yang direncanakan. Kegagalan pencapaian target tahun 2016 dikarenakan:

- a) Keterlambatan penyusunan LHP, yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya seluruh kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b) Perangkat Daerah tidak serius menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat;
- c) Perubahan struktur organisasi Inspektorat berikut tugas fungsinya mengganggu kerja internal pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017, tanggung jawab pelaksanaan kegiatan pemutakhiran tindak lanjut bergeser dari Sekretariat ke Inspektur Pembantu Bidang Khusus.

## 3) Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat

Target: WTP, realisasi: WTP, capaian kinerja: 100% (Baik)

LKPD tahun 2015 merupakan pertama kali menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh, lebih kompleks daripada LKPD tahun sebelumnya yang menggunakan SAP berbasis *Cash Flow Based* menuju *Accrual Based*. Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan:

- a) Inspektorat sudah menyiapkan Tim Reviu yang kompeten dan telah dibekali pengetahuan melalui bimtek SAP berbasis akrual secara intensif;
- b) Koordinasi yang terus menerus dengan BPK-RI dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c) Memberikan bimbingan penyusunan pelaporan keuangan berbasis akrual dan asistensi *stock opname* barang ke seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

## d. Sasaran Keempat: *Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat*

### 1) Persentase OPD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas

Target: 80%, realisasi: 80%, capaian kinerja: 100% (Baik)

Tahun 2016, Inspektorat menargetkan 80% (44 PD) dari 56 PD di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat nilai hasil evaluasi SAKIP-nya adalah  $\geq B$ . Pada tahun 2015 nilai hasil evaluasi SAKIP sudah  $\geq B$ . Hasil ini dianggap baik dan berhasil karena masih ada sekitar 3 (tiga) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP yang belum diserahkan tim



evaluatur ke bagian pelaporan, dari 3 LHE tersebut dimungkinkan ada yang bisa mendapat nilai  $\geq B$ .

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan:

- a) Tim Evaluatur Inspektorat selain melakukan evaluasi juga melakukan pembinaan perbaikan SAKIP Perangkat Daerah;
- b) Komitmen dan kesadaran Perangkat Daerah semakin meningkat.

Tabel 3.5.  
Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2016		
		(LKIP TA. 2015)		
1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	89,80	A	MEMUASKAN
2	BIRO ORGANISASI	88,84	A	MEMUASKAN
3	INSPEKTORAT	86,40	A	MEMUASKAN
4	DINAS KESEHATAN	85,67	A	MEMUASKAN
5	BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	85,07	A	MEMUASKAN
6	DINAS SOSIAL	84,74	A	MEMUASKAN
7	BPPPKB	83,40	A	MEMUASKAN
8	DINAS PENDAPATAN	81,96	A	MEMUASKAN
9	DISKOMINFO	81,95	A	MEMUASKAN
10	RUMAH SAKIT PARU	80,38	A	MEMUASKAN
11	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	80,09	A	MEMUASKAN
12	RUMAH SAKIT JIWA	79,50	BB	SANGAT BAIK
13	DINAS KOPERASI DAN UMKM	78,96	BB	SANGAT BAIK
14	DINAS PERKEBUNAN	78,96	BB	SANGAT BAIK
15	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	78,45	BB	SANGAT BAIK
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	74,91	BB	SANGAT BAIK
17	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	72,89	BB	SANGAT BAIK
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	72,08	BB	SANGAT BAIK
19	BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH	71,68	BB	SANGAT BAIK
20	BKPP WILAYAH III	71,60	BB	SANGAT BAIK
21	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH	71,36	BB	SANGAT BAIK
22	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	71,07	BB	SANGAT BAIK
23	DINAS BINA MARGA	70,66	BB	SANGAT BAIK
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	70,54	BB	SANGAT BAIK
25	RSUD AL-IHSAN	70,08	BB	SANGAT BAIK
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	69,64	B	BAIK
27	DINAS PEMUKIMAN PERUMAHAN	69,49	B	BAIK
28	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	68,96	B	BAIK
29	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	68,46	B	BAIK
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	68,30	B	BAIK
31	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	67,44	B	BAIK
32	DINAS PETERNAKAN	66,04	B	BAIK
33	BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	64,55	B	BAIK
34	DINAS PERHUBUNGAN	64,47	B	BAIK
35	DINAS KEHUTANAN	64,19	B	BAIK
36	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU	63,27	B	BAIK
37	BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH	62,49	B	BAIK
38	BIRO HUKUM DAN HAM	62,31	B	BAIK
39	BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA	62,19	B	BAIK
40	SEKRETARIAT BAKORLUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	61,78	B	BAIK
41	BIRO PENGEMBANGAN SOSIAL	61,02	B	BAIK

42	BIRO PELAYANAN SOSIAL DASAR	61,02	B	BAIK
43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	61,02	B	BAIK
44	BAKESBANGPOL	60,12	B	BAIK
45	BIRO PEMERINTAHAN UMUM	58,57	CC	CUKUP
46	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	56,57	CC	CUKUP
47	BIRO HUMAS, PROTOKOL DAN UMUM	55,73	CC	CUKUP
48	BKPP WILAYAH IV	54,36	CC	CUKUP
49	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	52,72	CC	CUKUP
50	SEKRETARIAT DPRD	51,00	CC	CUKUP
51	DINAS PENDIDIKAN	45,26	C	KURANG
52	BIRO KEUANGAN	44,36	C	KURANG
53	BKPP WILAYAH I	40,29	C	KURANG
54	BKPP WILAYAH II			
55	SEKRETARIAT DEWAN KORPRI			
56	KANTOR PERWAKILAN			

2) **Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

Target: A, realisasi: A, capaian kinerja: 100% (Baik)

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan:

- a) Gubernur sangat berkomitmen dalam upaya meningkatkan kualitas SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b) Intensifikasi pembinaan SAKIP OPD yang dilakukan oleh Inspektorat, Biro Organisasi, dan Bappeda, selaku instansi yang ditunjuk oleh Gubernur dalam upaya meningkatkan nilai SAKIP Pemprov Jabar;
- c) Koordinasi yang terus menerus dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

e. **Sasaran Kelima: Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada OPD Provinsi Jawa Barat**

• **Persentase OPD yang melaksanakan SPIP**

Target: 75%, realisasi: 47%, capaian kinerja: 64% (Cukup)

Kegagalan pencapaian kinerja dikarenakan:

- a) Tim Satgas SPIP Provinsi Jawa Barat yang sudah dibentuk tidak aktif;
- b) Beban kinerja Inspektorat yang semakin bertambah dan anggaran yang terbatas membuat kegiatan pembinaan SPIP terlupakan.

f. **Sasaran Keenam: Meningkatnya nilai pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat**

1) **Persentase kualitas nilai indikator RAD-PPK**

Target: 100%, realisasi: 100%, capaian kinerja: 100% (Baik)

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan:

- a) Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota pelaksana RAD PPK dilakukan dengan intensif;



b) Didukung juga (paralel) dengan kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK, Inspektorat berperan sebagai sekretariat juga, sehingga kegiatan RAD PPK dilaksanakan/dimonitoring lebih intensif.

2) Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat

Target: 75%, realisasi: 22,7% atau 75%, capaian kinerja: 30,2% atau 100% (Baik)

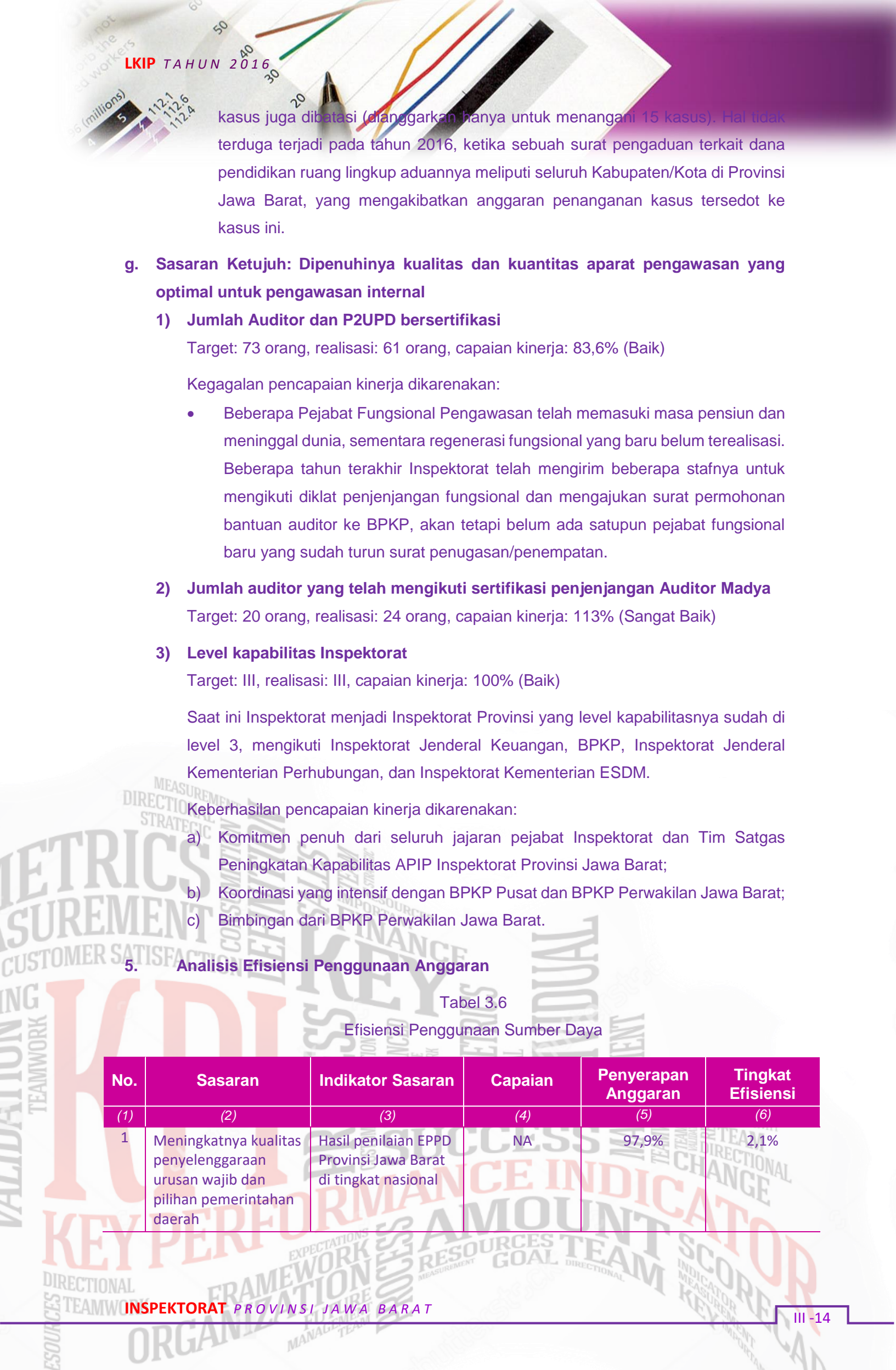
Tabel 3.6.  
Rekapitulasi Kasus Pengaduan

NO	SUMBER	KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI				
		SELESAI	DALAM PROSES	BELUM DIAUDIT	JUMLAH	TOTAL DIAUDIT
1	Itjen Kemendagri		1	2	3	1
2	Menpan & RB			1	1	
3	Setneg		1	2	3	1
4	Masyarakat		3	11	14	3
5	Gubernur					
6	Kab/Kota			1	1	
7	ItjenKemen. Lainnya					
8	KPK					
9	BPK					
10	BPKP					
11	BKN					
12	BPN					
13	OPD					
JUMLAH		0	5	17	22	5

Pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2016 agak susah untuk ditentukan apakah berhasil atau gagal. Dari total 22 surat pengaduan yang masuk, Inspektorat menganggarkan pemeriksaan terhadap 15 kasus (sekitar 75% dari surat kasus pengaduan yang masuk). Pada tahun 2016 Inspektorat hanya bisa menindaklanjuti 5 surat pengaduan (sekitar 22,7%), akan tetapi ada 1 (satu) surat terkait pengaduan kasus dugaan pidana tindak pidana korupsi dana Beasiswa Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dan BOS Provinsi Jawa Barat, ditindak lanjuti oleh Inspektorat dengan mengirimkan 12 Tim Investigasi ke 12 Kabupaten/Kota (12 paket pembiayaan), sehingga total dilakukan pemeriksaan terhadap 15 kasus (100%). Inspektorat kesulitan menentukan apakah pencapaian kinerja hanya 22,7% atau 100%.

Kegagalan pencapaian kinerja dikarenakan:

- Anggaran untuk penanganan kasus sudah dibatasi dari awal dan minim, hal ini dikarenakan selain kecenderungan kasus yang masuk setiap tahunnya sedikit (sekitar 15-20 kasus), beban kinerja pengawasan dan pembinaan juga sudah sangat banyak, sehingga pengalokasian SDM dan anggaran untuk penanganan



kasus juga dibatasi (dianggarkan hanya untuk menangani 15 kasus). Hal tidak terduga terjadi pada tahun 2016, ketika sebuah surat pengaduan terkait dana pendidikan ruang lingkup aduannya meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, yang mengakibatkan anggaran penanganan kasus tersedot ke kasus ini.

g. Sasaran Ketujuh: Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk pengawasan internal

1) Jumlah Auditor dan P2UPD bersertifikasi

Target: 73 orang, realisasi: 61 orang, capaian kinerja: 83,6% (Baik)

Kegagalan pencapaian kinerja dikarenakan:

- Beberapa Pejabat Fungsional Pengawasan telah memasuki masa pensiun dan meninggal dunia, sementara regenerasi fungsional yang baru belum terealisasi. Beberapa tahun terakhir Inspektorat telah mengirim beberapa stafnya untuk mengikuti diklat penjenjangan fungsional dan mengajukan surat permohonan bantuan auditor ke BPKP, akan tetapi belum ada satupun pejabat fungsional baru yang sudah turun surat penugasan/penempatan.

2) Jumlah auditor yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan Auditor Madya

Target: 20 orang, realisasi: 24 orang, capaian kinerja: 113% (Sangat Baik)

3) Level kapabilitas Inspektorat

Target: III, realisasi: III, capaian kinerja: 100% (Baik)

Saat ini Inspektorat menjadi Inspektorat Provinsi yang level kapabilitasnya sudah di level 3, mengikuti Inspektorat Jenderal Keuangan, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dan Inspektorat Kementerian ESDM.

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan:

- a) Komitmen penuh dari seluruh jajaran pejabat Inspektorat dan Tim Satgas Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
- b) Koordinasi yang intensif dengan BPKP Pusat dan BPKP Perwakilan Jawa Barat;
- c) Bimbingan dari BPKP Perwakilan Jawa Barat.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.6  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional	NA	97,9%	2,1%



	Meningkatnya kualitas administrasi umum pemerintahan	Persentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi	NA	99,7 %	13%
3	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD	113%	87 %	13%
		Persentase penyelesaian TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap OPD Provinsi	85,9%	87%	-
		Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat	100%	99,7%	0,3%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persentase OPD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas	98,8%	99,7%	-
		Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat	100%	99,7%	0,3%
5	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah	Persentase OPD yang melaksanakan SPIP	64%	99,7%	-
6	Meningkatnya nilai pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat	Persentase kualitas nilai indikator RAD-PPK	100%	99,6%	0,4%
		Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat	100%	99,2%	0,8%
7	Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk pengawasan internal	Jumlah Auditor dan P2UPD bersertifikasi	83,6%	91,1%	-
		Jumlah auditor yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan Auditor Madya	120%	91,1%	8,9%
		Level kapabilitas Inspektorat	100%	99,6%	0,4%

Tabel 3.7

## Penyerapan Anggaran Kegiatan Inspektorat

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran
			Keuangan (Rp)	%	
1	3	4	5	6	7
1	Belanja Tidak Langsung /Gaji/Tunjangan	17.803.394.426,00	17.655.134.167,00	98,64	110.183.170,00
2	Belanja Langsung	25.897.885.000,00	25.544.578.821,00	99,17	353.306.179,00
<b>A. Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan :</b>					
1.	Pelaksana Pemeriksaan dan Evaluasi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.	15.461.601.000,00	15.454.812.500,00	99,96	6.788.500,00
2.	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat.	718.984.400,00	713.207.216,00	99,20	5.777.184,00
3.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Kebijakan Pengawasan dan Rencana Kerja Pengawasan.	600.000.000,00	592.875.000,00	98,81	7.125.000,00
4.	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri, Itjen Kementerian Lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.	872.068.000,00	758.880.642,00	87,02	113,187,358,00
5.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Pemerintah Kabupaten/Kota.	800.000.000,00	783.162.061,00	97,90	16.837.939,00
6.	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	589.086.000,00	586.865.000,00	99,62	2.221.000,00
<b>B. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah, yang meliputi pelaksanaan kegiatan :</b>					
7.	Desk Akuntabilitas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat	90.000.000,00	76.952.609,00	85,50	13.047.391,00
<b>C. Program Pengembangan Kopetensi Aparatur yang meliputi pelaksanaan Kegiatan :</b>					
8.	Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pengawasan.	378.293.000,00	367.998.766,00	97,28	10.294.234,00
9.	Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Barat	618.000.000,00	563.146.800,00	91,12	54.853.200,00
<b>D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi pelaksanaan kegiatan :</b>					
10.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Inspektorat Provinsi Jawa Barat.	2.487.260.000,00	2.446.225.071,00	98,35	41.034.929,00



E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi pelaksanaan kegiatan:					
11.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	873.900.000,00	861.139.400,00	98,54	12.760.600,00
F. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi kegiatan :					
12.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat.	2.255.667.000,00	2.189.585.536,00	97,07	66.081.464,00
G. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah meliputi kegiatan :					
13.	Pengelolaan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Barat	99.025.000,00	96.505.920,00	97,46	2.519.080,00
H. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi kegiatan :					
15.	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal	54.000.000,00	53.222.300,00	98,56	777.700,00
JUMLAH		43.701.279.426,00	43.199.712.988,00	98,85	501.566.438,00

Pada tahun 2016, Inspektorat mendapat apresiasi positif dari Gubernur karena menjadi PD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang persentase penyerapan anggarannya paling tinggi. Meskipun hal tersebut bukan menjadi dasar penilaian kinerja yang baik, akan tetapi mengindikasikan bahwa Inspektorat telah mampu memanajemen keuangannya dengan baik.